



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

JURNAL MANAJEMEN PUBLIK & KEBIJAKAN PUBLIK (JMPKP)

Kampus I : Jl. Bali Kota Bengkulu 38119 Website : Kampus II : Jl. Salak Raya Kota Bengkulu
<http://www.umb.ac.id> Kampus III : Jl. S. Parman No.25 Kota Bengkulu E-MAIL:

Telp. (0736) 22756, 342920, 21161

humas@umb.ac.id

Fax. (0736) 26161

admpublik@umb.ac.id

SURAT KETERANGAN PENERIMAAN ARTIKEL JURNAL TERAKREDITASI SINTA 4

(Letter of Acceptance) No. 74/JMPKP/2/2026

Dewan penyunting Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPK) dengan Nomor *ISSN Print : 2685-7499 ISSN Online : 2745-8660*, yang memuat artikel-artikel ilmiah dari berbagai disiplin ilmu Manajemen Publik, Kebijakan Publik dan administrasi Publik, dengan ini menyatakan bahwa artikel dengan judul “Analisis power interest grid dalam penanggulangan abrasi pantai di kepulauan banyak”.

Nama Penulis:

1. Riska Rahmainur
2. Siti nur zalikha

Menyatakan bahwa artikel tersebut telah diproses sesuai Prosedur Penulisan di Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPK) Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan akan diterbitkan pada Volume 8 Nomor 2 Tahun 2026. Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Bengkulu, 27 April 2026
Editorial Chief

Dr. Titi Darmi, M. Si.

Analisis Power Interest Grid Dalam Penanggulangan Abrasi Pantai di Kepulauan Banyak

Analysis Of Power Interest Grid In Coastal Abrasion Commitment In Kepulauan Banyak

Riska Rahmainur¹ Siti Nur Zalikha²

^{1,2}Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
email: 220802011@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: Coastal abrasion in the Banyak Islands threatens the sustainability of the environment, infrastructure, and livelihoods of coastal communities. This erosion accelerates land loss and damages coastal ecosystems caused by ocean waves, human activities, and the extraction of coastal materials. This study examines stakeholder involvement in addressing coastal abrasion in the Banyak Islands. This study used a qualitative approach through observation, documentation, and semi-structured interviews with various informants including the Aceh Singkil Regional Disaster Management Agency (BPBD), village heads, sea commanders, fishermen, and local communities. The analysis was conducted using the Power-Interest Grid framework, which is useful for mapping the roles and influence of each stakeholder. The mapping results show the BPBD as players (high power and interest), the community and fishermen as subjects (high interest but low power), and the sea commander as context setters. The most impacted communities and fishermen have low levels of power, so their participation is suboptimal.

Keywords: Coastal abrasion; Stakeholders; Power-Interest Grid; Disaster management

Abstrak: Abrasi pantai di Kepulauan Banyak mengancam keberlangsungan lingkungan, infrastruktur, dan mata pencaharian masyarakat pesisir. Abrasi ini mempercepat hilangnya daratan dan merusak ekosistem pesisir yang disebabkan oleh gelombang laut, aktivitas manusia, dan pengambilan material di pesisir. Penelitian bertujuan untuk melihat keterlibatan pemangku kepentingan dalam penanganan abrasi pantai di Kepulauan Banyak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melalui observasi, dokumentasi, wawancara semi-struktur dengan berbagai informan yang terdiri dari BPBD Aceh Singkil, kepala desa, panglima laut, nelayan dan masyarakat setempat. Analisis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kerangka Power-Interest Grid yang berguna untuk memetakan peran dan pengaruh masing-masing pemangku kepentingan. Hasil pemetaan menunjukkan BPBD sebagai players (*power* dan *interest* tinggi), masyarakat dan nelayan sebagai subjects (interest tinggi tetapi *power* rendah), serta panglima laut sebagai *context setters*. Masyarakat dan nelayan yang paling terdampak memiliki tingkat kekuasaan yang rendah, sehingga partisipasi mereka belum optimal.

Kata Kunci : Abrasi pantai; Stakeholders; Power-Interest Grid; Manajemen bencana

PENDAHULUAN

Pantai di Indonesia menghadapi ancaman abrasi yang dipengaruhi oleh faktor alam dan nonalam (Lekatompessy dan Maturbongs, 2021). Sedangkan faktor nonalam antara lain penebangan mangrove dan pengambilan pasir secara berlebihan di kawasan pesisir yang mengabaikan kelestarian lingkungan (Muffaroh dan Sari, 2024). Abrasi menjadi permasalahan serius karena tidak hanya mengancam kondisi lingkungan pesisir, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat melalui kerusakan infrastruktur vital, seperti jalan, jembatan, fasilitas umum, bangunan penunjang wisata, serta rumah penduduk yang berada di wilayah pesisir (Yanti dan Maulidian, 2022).

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Aceh Tahun 2016–2020, sebanyak 18 kabupaten/kota di Provinsi Aceh berpotensi mengalami bencana gelombang ekstrem dan abrasi pantai dengan total luas wilayah terdampak mencapai 51.162 hektare. Berdasarkan hasil analisis tingkat bahaya, Provinsi Aceh dikategorikan memiliki risiko abrasi yang tinggi sehingga diperlukan upaya mitigasi dan penanggulangan secara terpadu melalui penguatan kebijakan serta keterlibatan aktif pemerintah dan masyarakat (BNPB, 2020). Beberapa wilayah mengalami hilangnya garis pantai akibat abrasi parah, terutama Aceh Singkil yang menempati urutan kedua terluas (7.441 Ha, kelas tinggi). Aceh Singkil khususnya Kepulauan Banyak, Daerah yang menjadi destinasi wisata kunjungan terpopuler dengan potensi pariwisata tinggi sehingga kerusakan abrasi berpotensi berdampak pada ekonomi masyarakat setempat (BNPB, 2020).

Sesuai dengan data yang dilaporkan oleh media serambi.com pada minggu, 1 Oktober 2023, abrasi semakin menggerus Pulau Banyak di Kabupaten Aceh Singkil, sehingga menyebabkan berkurangnya luas daratan, terjadi karena ombak langsung menghantam bibir pantai tanpa adanya pengaman, sehingga merusak bangunan pemerintah, infrastruktur wisata, serta rumah penduduk. Jalan lingkar di Pulau Balai juga terkena dampak, mengakibatkan penyempitan area. Terlihat parah di sisi barat dan utara Pulau Balai, dengan penggerusan daratan mencapai 15 hingga 40 meter. Camat Pulau Banyak, menyatakan bahwa usulan penanganan abrasi sudah diajukan berkali-kali tetapi belum direalisasikan. Pulau Balai merupakan pusat pemerintahan dan layanan untuk ribuan wisatawan, dan rumah

bagi sekitar 3.534 orang, atau 80% dari total populasi Pulau Banyak. Pulau Barai memiliki luas sekitar 90 hektar dengan garis pantai sepanjang 2,7 km dan lebar 450 meter (Rosadi, 2023).

Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yakni penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program Pembangunan dan pengalokasian dana penanggulangan bencana alam (Palgi, 2026).

Power Interest Grid digunakan untuk memetakan tingkat kekuatan dan kepentingan para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan abrasi pantai di Kepulauan Banyak. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki kekuatan dan kepentingan yang tinggi sebagai pengambil kebijakan sekaligus pelaksana utama mitigasi, sedangkan masyarakat dan nelayan memiliki kepentingan tinggi karena terdampak langsung oleh abrasi, namun memiliki kekuatan yang relatif rendah sehingga memerlukan dukungan dan pemberdayaan. Panglima Laut berperan sebagai penghubung dengan kekuatan menengah dan kepentingan tinggi, sementara Kepala Desa Pulau Balai memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan kegiatan di tingkat lokal dengan tingkat kekuatan dan kepentingan yang cukup tinggi. Pemetaan ini menjadi dasar dalam menyusun strategi pelibatan dan pengelolaan pemangku kepentingan agar penanggulangan abrasi dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan (Utomo et al., 2020).

Penelitian terdahulu mengenai penanggulangan abrasi pantai menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian Pramono et al (2024) menggunakan analisis SWOT menemukan bahwa kekuatan lokal belum mampu mengatasi kelemahan infrastruktur. Sedangkan Penelitian Reawaruw dan Prabawa (2023) mengidentifikasi adaptasi masyarakat nelayan melalui diversifikasi pendapatan sebagai respons terhadap dampak perubahan iklim, termasuk abrasi. Meskipun demikian, permasalahan abrasi hingga kini belum terselesaikan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan

pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, seperti BPBD Aceh Singkil, pemerintah desa, panglima laut, dan masyarakat, dalam upaya penanggulangan abrasi melalui pendekatan yang terintegrasi. Selain penerapan langkah teknis, seperti penanaman mangrove, pembangunan pemecah ombak, pengurangan pengambilan pasir pantai, dan kebijakan tata ruang yang mendukung konservasi pesisir, keterlibatan aktif seluruh pihak menjadi kunci untuk mewujudkan program mitigasi yang efektif, berkelanjutan, serta mampu menjaga kelestarian ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Fenomena di wilayah pesisir kepulauan banyak mengalami pengikisan pantai yang cukup parah, yang menyebabkan hilangnya daratan serta kerusakan infrastruktur dan habitat penting bagi ekosistem. Kondisi ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama nelayan dan pelaku pariwisata, karena berkurangnya lahan dan potensi wisata membuat pendapatan mereka menurun. Upaya penanggulangan abrasi di wilayah ini masih sangat minim dan belum berjalan efektif. Berbagai usulan penanganan sudah pernah diajukan, namun sampai saat ini belum terealisasi, sehingga pengelolaan dan penanggulangan bencana belum optimal. Selain itu, kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian pesisir juga masih rendah seperti reboisasi kembali pohon bakau di tepi pantai, pengambilan pasir di tepi pantai dan pembangunan yang kurang ramah lingkungan turut memperburuk kondisi abrasi. Akibatnya, program pelestarian dan rehabilitasi pesisir yang ada menjadi kurang maksimal. Kondisi ini menuntut adanya kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah abrasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu penelitian tertarik untuk membahas tentang “Analisis *power interest grid* dalam penanggulangan abrasi pantai di kepulauan banyak” (studi kasus Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memetakan keterlibatan dan pengaruh masing-masing pemangku kepentingan dalam penanggulangan abrasi pantai di Kepulauan Banyak menggunakan kerangka Power-Interest Grid.

METODE

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode naratif untuk menganalisis peran dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penanggulangan abrasi pantai di Kepulauan Banyak (Khoiron, 2019). Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara semi-struktur, dan dokumentasi dari informan terdiri dari 1 orang dari BPBD, 1 Kepala desa, 2 Masyarakat, 2 Nelayan, 1 Panglima laut. Analisis data dilakukan menggunakan kerangka power-interest grid untuk memetakan tingkat kekuatan (power) dan kepentingan (interest) masing-masing pemangku kepentingan terhadap isu abrasi, sehingga dapat mengidentifikasi peran dan pengaruh mereka dalam upaya mitigasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif naratif untuk menggambarkan dinamika kolaborasi pemangku kepentingan dalam penanggulangan abrasi pantai secara berkelanjutan. Analisis dilakukan menggunakan Power-Interest Grid, dengan tingkat power dinilai berdasarkan kewenangan, akses sumber daya, dan pengaruh, sedangkan tingkat interest berdasarkan besarnya dampak abrasi, ketergantungan terhadap sumber daya pesisir, dan keterlibatan dalam penanggulangan abrasi. Penilaian dilakukan melalui pemberian skor berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen, kemudian dikategorikan ke dalam tingkat rendah atau tinggi. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, metode, dan dokumen untuk meningkatkan validitas temuan penelitian. Pendekatan naratif ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial dan lingkungan yang berdampak secara langsung, sekaligus merumuskan rekomendasi strategis berdasarkan hasil analisis partisipatif dari berbagai aktor terkait (Utomo et al., 2020).

HASIL

Pemangku kepentingan dalam penanggulangan abrasi pantai melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan kepentingan berbeda. Berikut adalah beberapa pemangku kepentingan utama yang terlibat adalah:

Tabel 1. Analisis Power-Interest Stakeholder Abrasi Pulau Balai

No	Stakeholder	Power	Interest
1	Badan Penanggulangan Bencana	Bertanggung jawab dalam penanganan bencana, termasuk penyusunan rencana mitigasi.	Mengurangi risiko bencana dan dampak negatif dari abrasi terhadap Masyarakat
2	Kepala Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak	Kepala Desa memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan dan mengkoordinasikan upaya mitigasi di tingkat desa. Mereka dapat mengarahkan sumber daya dan memfasilitasi kolaborasi antara masyarakat dan pihak lain, seperti Pemerintah Daerah dan LSM.	Kepala Desa berkepentingan untuk melindungi kehidupan dan mata pencaharian warga dari dampak negatif abrasi, seperti kerusakan rumah dan kehilangan lahan pertanian.
3	Panglima laut	Panglima Laut adalah pemimpin adat yang memiliki legitimasi kuat di masyarakat nelayan. Mereka berperan sebagai mediator konflik dan pengatur sumber daya laut, sehingga berpengaruh dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan pesisir.	Panglima Laut memiliki kepentingan untuk menjaga kelestarian sumber daya laut dan pesisir demi keberlangsungan hidup masyarakat nelayan. Penanggulangan abrasi pantai menjadi prioritas utama untuk memastikan ekosistem tetap sehat dan produktif.
4	Nelayan	Nelayan memiliki kekuatan dalam pengelolaan sumber daya laut dan merupakan pihak yang paling terpengaruh oleh abrasi pantai, sehingga suara mereka krusial dalam pengambilan keputusan.	Nelayan berupaya menjaga kelestarian sumber daya laut untuk menjamin kelangsungan mata pencaharian mereka. Penanggulangan abrasi pantai sangat penting karena menjaga ekosistem pesisir yang menjadi habitat ikan dan mendukung aktivitas penangkapan ikan.
5	Masyarakat	Terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari yang dipengaruhi oleh abrasi dan memiliki pengetahuan lokal tentang kondisi pesisir.	Mempertahankan mata pencaharian (seperti perikanan dan pariwisata) serta melindungi lingkungan tempat tinggal mereka

Hasil analisis pada Tabel 1 menunjukkan bahwa setiap pemangku kepentingan memiliki tingkat kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*) yang berbeda dalam penanggulangan abrasi di Pulau Balai. BPBD memiliki kekuasaan yang bersumber dari kewenangan formal dalam penyusunan rencana mitigasi dan penanganan bencana, dengan kepentingan utama mengurangi risiko abrasi

terhadap masyarakat. Kepala Desa memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan upaya mitigasi di tingkat lokal serta menjembatani kerja sama antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dan nelayan memiliki kepentingan yang sangat tinggi karena abrasi secara langsung memengaruhi tempat tinggal, mata pencaharian, serta keberlanjutan sumber daya pesisir, meskipun pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan masih terbatas. Sementara itu, Panglima Laut memiliki kekuatan yang berasal dari legitimasi adat dan pengaruh sosial dalam pengelolaan sumber daya laut sehingga berperan sebagai mediator serta pendukung upaya pelestarian pesisir. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan abrasi sangat bergantung pada sinergi antara aktor yang memiliki kewenangan formal dengan subject yang memiliki pengetahuan lokal dan pengaruh sosial di masyarakat.



Gambar 1. Matriks Power-Interest Grid

Table 2. Memetakan Tingkat *Power Interest Grid* Para Pemangku Kepentingan

no		Tingkat <i>interest</i>	Tingkat <i>power</i>	Kategori <i>power interest grid</i>	Hasil temuan penelitian
1.	BPBD Aceh Singkil	(Tinggi) Aspek sosial-ekonomi yaitu kurangi risiko bencana bagi masyarakat dan aspek politik yaitu perencanaan mitigasi	(tinggi) aspek hukum (utilitarian/normatif) uu 24 Tahun 2007	<i>Players</i>	Bertindak sebagai pelaksana dalam mengurangi dampak dan menangani bencana abrasi, dengan kewenangan operasional terbatas, bergantung pada instruksi dari pemimpin lokal dan peraturan yang berlaku dan rekomendasi ke pemerintah daerah.
2.	Kepala Desa Pulau Balai	(Tinggi) Aspek sosial yaitu melindungi warga dan infrastruktur, aspek ekonomi pendapatan tambahan dan aspek politik koordinasi lokal	(sedang) Koersif/normatif akses kebijakan (larangan pasir) belum ada perdes khusus.	Subjects ke <i>players</i>	memainkan peran penting dalam pemerintahan desa dan bertindak sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Keterbatasan dana desa menghambat upaya nyata untuk mengatasi masalah abrasi.
3	Panglima laut	(sedang-tinggi) Aspek sosial yaitu kelestarian sumber daya laut	(Sedang) Normatif adat	Context <i>setters</i>	pengakuan adat dan pengaruh normatif yang kuat dalam mengatur kegiatan perikanan. mampu mendukung upaya mitigasi abrasi tetapi belum secara formal terlibat dalam kebijakan pemerintah.
4	Nelayan	(Tinggi) Aspek ekonomi yaitu kelestarian habitat ikan dan aspek sosial mata pencaharian harian.	Rendah	<i>subjects</i>	bergantung pada ekosistem pesisir untuk mata pencaharian. Abrasi mengancam hasil tangkapan ikan dan kegiatan perikanan, tetapi pengaruh mereka dalam pembuatan kebijakan masih terbatas.
5	Masyarakat	(Tinggi) Aspek sosial yaitu pengetahuan lokal dan tempat tinggal Aspek ekonomi yaitu perikanan dan pariwisata	Rendah	<i>Subjects</i>	kelompok yang paling terdampak oleh dampak ekonomi dan sosial dari abrasi. memiliki pemahaman lokal tetapi belum diberdayakan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan pemetaan Power-Interest Grid pada Tabel 2, BPBD Aceh Singkil dikategorikan sebagai *players* karena memiliki tingkat kepentingan dan kekuasaan yang tinggi melalui kewenangan hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan mitigasi abrasi. Kepala Desa Pulau Balai berada pada posisi transisi antara *subjects* dan *players*, mengingat memiliki kepentingan yang tinggi dalam melindungi masyarakat serta peran koordinatif di tingkat desa, namun

kewenangannya masih dibatasi oleh belum adanya regulasi desa khusus dan keterbatasan sumber daya. Masyarakat dan nelayan termasuk kategori subjects karena memiliki kepentingan yang tinggi akibat dampak langsung abrasi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi, tetapi memiliki pengaruh yang rendah dalam proses pengambilan keputusan. Panglima Laut dikategorikan sebagai context setters karena memiliki kekuatan normatif melalui hukum adat dan pengaruh sosial dalam pengelolaan wilayah pesisir, meskipun keterlibatannya dalam kebijakan formal masih terbatas. Secara keseluruhan, pemetaan ini menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan abrasi memerlukan penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan, pemberdayaan kelompok subjects, serta integrasi peran kelembagaan formal dan adat dalam perencanaan dan pelaksanaan mitigasi abrasi.

PEMBAHASAN

Hasil analisis Power–Interest Grid menunjukkan bahwa pemangku kepentingan dalam penanggulangan abrasi di Pulau Balai memiliki tingkat pengaruh (*power*) dan kepentingan (*interest*) yang berbeda sehingga membutuhkan strategi pelibatan yang berbeda pula. BPBD Aceh Singkil menempati kategori players karena memiliki kewenangan formal, dasar hukum yang kuat, serta kepentingan tinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan mitigasi abrasi. Kepala Desa Pulau Balai berada pada posisi transisi antara subjects dan players karena memiliki kepentingan yang tinggi dalam melindungi masyarakat dan mengoordinasikan kegiatan di tingkat desa, namun pengaruhnya masih dibatasi oleh belum adanya peraturan desa khusus mengenai abrasi serta keterbatasan anggaran. Di sisi lain, masyarakat dan nelayan dikategorikan sebagai subjects karena menjadi kelompok yang paling terdampak secara sosial dan ekonomi akibat abrasi, memiliki pengetahuan lokal yang baik, tetapi belum memperoleh ruang yang memadai dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan mitigasi yang masih bersifat *top-down* perlu diubah menjadi lebih partisipatif melalui pemberdayaan masyarakat pesisir. Sementara itu, Panglima Laut dikategorikan sebagai context setters karena memiliki pengaruh normatif melalui hukum adat dan legitimasi sosial yang mampu

memengaruhi perilaku masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir, meskipun keterlibatannya dalam kebijakan formal masih terbatas.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Lee et al. (2024) yang menyatakan bahwa aktor pemerintah umumnya memiliki kewenangan dan kapasitas terbesar dalam pengambilan keputusan, sementara kelompok masyarakat lebih banyak berperan sebagai penerima dampak sehingga perlu diperkuat keterlibatannya dalam tata kelola sumber daya. Namun, penelitian ini memberikan temuan yang lebih spesifik dengan mengidentifikasi posisi transisi Kepala Desa sebagai subjects menuju players, yang menunjukkan adanya potensi peningkatan pengaruh pemerintah desa dalam mitigasi abrasi apabila didukung regulasi dan sumber daya yang memadai.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Panglima Laut berperan sebagai context setters karena memiliki pengaruh normatif melalui hukum adat, meskipun keterlibatannya dalam kebijakan formal masih terbatas. Temuan ini berbeda dengan penelitian Nurfallah dan Saputra (2025) yang memetakan pemangku kepentingan pengembangan kawasan pesisir berbasis blue economy ke dalam kelompok inti, pendukung, dan kontekstual tanpa menyoroti secara khusus peran kelembagaan adat sebagai aktor strategis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru melalui pengakuan bahwa kelembagaan adat dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan mitigasi abrasi di wilayah pesisir.

Interest atau kepentingan adalah sebuah kontinum dan selalu dinamis bergantung pada perubahan yang terjadi. Kepentingan mempunyai kewajiban untuk selalu menjaga keseimbangan dengan tidak mengesampingkan salah satu (Iswadi, 2025). Penanggulangan abrasi pantai di kepulauan banyak menunjukkan adanya kepentingan dari beberapa pemangku kepentingan. Analisis pemangku kepentingan dalam abrasi tingkat kepentingan terhadap penanggulangan abrasi pantai dipengaruhi oleh hak, kepemilikan, pengetahuan, dan kontribusi.

Power didefinisikan sebagai hubungan antar pelaku sosial di mana pihak berkuasa dapat mengubah jalannya peristiwa, mengatasi perlawanan, dan membujuk individu/kelompok bertindak tertentu, sering berdasarkan akses kontrol atas dependen lainnya. Dalam model salience Mitchell et al. (1997), *power* adalah

atribut utama di mana manajer memandang *stakeholder* "memiliki kemampuan memaksakan kehendak mereka pada perusahaan" (Hasan, 2017).

Selanjutnya, penelitian ini mengidentifikasi bahwa belum adanya regulasi lokal khusus dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi hambatan utama dalam penanggulangan abrasi. Hasil ini konsisten dengan penelitian Rusadi et al. (2024) yang menyimpulkan bahwa implementasi *Good Environmental Governance* dalam penanganan abrasi menghadapi kendala berupa koordinasi lintas sektor yang belum efektif, keterbatasan sumber daya, konflik kepentingan, dan perlunya partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Demikian pula, penelitian Nisa dan Mashur (2025) di Pulau Bengkalis menunjukkan bahwa tumpang tindih kewenangan, ego sektoral, dan belum adanya regulasi khusus menyebabkan penanganan abrasi belum optimal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemangku kepentingan dalam mitigasi abrasi pantai di Kepulauan Banyak terbagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu *players* (BPBD), *subjects* (kepala desa, masyarakat, dan nelayan), serta *panglima laut*, BPBD memiliki kekuasaan dan kepentingan yang tinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan mitigasi, sedangkan kepala desa, masyarakat, dan nelayan memiliki kepentingan tinggi tetapi kewenangan yang masih terbatas. Panglima Laut berperan sebagai *context setter* melalui pengaruh sosial dan hukum adat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Hambatan utama yang ditemukan adalah belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan serta belum tersedianya regulasi lokal yang secara khusus mengatur kolaborasi penanggulangan abrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan koordinasi, pemberdayaan masyarakat, dan penyusunan regulasi daerah menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas mitigasi abrasi. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan pemetaan pemangku kepentingan berbasis Power-Interest Grid yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi kolaboratif penanggulangan abrasi pantai di Kepulauan Banyak.

Saran

Kerja sama antar pemangku kepentingan perlu diperkuat dengan melihat seberapa besar pengaruh dan kepentingan masing-masing, agar upaya penanggulangan abrasi bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah daerah yang memiliki peran dan kepentingan besar perlu menjadi motor penggerak, dapat dimulai dari perencanaan, pemantauan, hingga memastikan anggaran tersedia secara konsisten. Di sisi lain, masyarakat setempat juga perlu dilibatkan lebih aktif, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun kegiatan konservasi, sehingga tumbuh rasa memiliki terhadap program yang dijalankan sekaligus memperkuat aturan di tingkat lokal. Peneliti selanjutnya disarankan mengembangkan analisis kolaborasi dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dan menggunakan pendekatan kuantitatif maupun campuran untuk mengevaluasi efektivitas strategi mitigasi abrasi. Dengan pemetaan pemangku kepentingan berbasis Power-Interest Grid, koordinasi lintas sektor diharapkan menjadi lebih terarah sehingga program mitigasi abrasi dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Azuga, N. A., Zahra, Z. A., Andini, A. S., Fauzan, I., Khaira, A. U., Ilahi, I., & Nur, M. I. (2025). Review dampak penambangan pasir laut terhadap dinamika abrasi garis pantai di kawasan pesisir Indonesia. *Jurnal Riset Kelautan Tropis (Journal of Tropical Marine Research)*, 7(1), 53–67. <https://doi.org/10.30649/jrkt.v7i1.112>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2020). *Kajian risiko bencana Aceh 2016–2020*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Hasan, A. (2017). Power stakeholder dalam bisnis. *Jurnal Media Wisata*, 15(2), 513–539. <https://doi.org/10.36276/mws.v15i2.107>
- Husain, S. (2022). Komunikasi stakeholder dalam kebijakan new normal pandemi Covid-19 di Sulawesi Tengah. *E-Jurnal Kinesik*, 9(1). <https://doi.org/10.22487/ejk.v9i1.380>
- Iswadi, M. P. (2025). *Teori Organisasi*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Khoiron, A., Kusumawati, A., & Mustamil, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. KPAI.
- Lee, M., Yoon, J. H., Yang, J. E., Namkoong, S., & Kim, H. (2024). Stakeholder analysis for effective implementation of water management system: Case of groundwater charge in South Korea. *Heliyon*, 10(3), e24699. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24699>
- Lekatompessy, R. L., & Maturbongs, E. E. (2021). Faktor-faktor dalam upaya mengatasi abrasi di pesisir pantai di wilayah Kabupaten Merauke. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v3i1.10994>

- Listyo, M., Soekmadi, R., & Susilo, H. (2018). Analysis of stakeholders in Betung Kerihun National Park ecosystem development, Kapuas Hulu District. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 8(1), 55–61. <https://doi.org/10.29244/jpsl.8.1.55-61>
- Muffaroh, K., & Sari, I. P. (2024). Upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan abrasi pantai di Kabupaten Kendal (Studi kasus pesisir Pantai Sendang Sikucing). *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 2(1), 157–170. <https://doi.org/10.24905/plj.v2i1.45>
- Nisa, S., & Mashur, D. (2026). Peran Stakeholders Dalam Mengatasi Abrasi di Pulau Bengkalis. *Jurnal Niara*, 18(3), 729-744. <https://doi.org/10.31849/ya5ryg51>
- Nurfallah, M., & Saputra, M. F. (2025). Stakeholder mapping in the development of coastal areas based on blue economy in Bima City. *Eduvest: Journal of Universal Studies*, 5(7). <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i7.1750>
- Palgi, M. (2026). *Implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan bencana banjir (Studi kasus di Kecamatan Malangke Barat)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Palopo). https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/12477/1/MUH.%20HARUN%20PALGI_2003020080%2026.pdf
- Pramono, Basana, Sidabutar, Y. F. D., & Hanafiah, U. I. M. (2024). Fenomena pengendalian ekosistem dan abrasi pantai Pulau Putri untuk mengangkat nilai citra kawasan dalam mendukung wisata bahari di Kecamatan Nongsa Kota Batam. *Jurnal Potensi*, 4(1), 23–29. <https://doi.org/10.37776/jpot.v4i1.1335>
- Reawaruw, Y. N. I., & Prabawa, T. S. (2023). Strategi adaptasi nelayan terhadap dampak perubahan iklim di Pulau Liki Kabupaten Sarmi, Papua. *Kritis*, 32(1), 24–42. <https://doi.org/10.24246/kritis.v32i1p24-42>
- Rosadi, D. (2023, October 1). Bencana abrasi di Kecamatan Pulau Banyak Aceh Singkil. *Tribun Aceh*. <https://aceh.tribunnews.com/2023/10/01/ibu-kota-kecamatan-pulau-banyak-aceh-singkil-terus-digerus-abrasi-camat-sesal-karena-tak-ditangani>
- Rusadi, S., Mulyawan, R., Suwaryo, U., & Yuningsih, N. Y. (2024). Bibliometric analysis of abrasion and erosion disaster mitigation: Trends, key themes, and potential for global policy development. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2430451>
- Rusadi, S., Mulyawan, R., Suwaryo, U., & Yuningsih, N. Y. (2024). Implementing good environmental governance to manage coastal abrasion in Bengkalis Regency, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 19(5), 1911–1919. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190529>
- Sukindrawati, B. S., & Qusnan, R. A. T. (2022). Pengaruh manajemen pemangku kepentingan terhadap kepercayaan dalam proyek konstruksi. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Riset (SNHR)* (pp. 241–248). <https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/snhr/article/view/2061/0>
- Sulasmî, E. (2021). *Manajemen dan Kepemimpinan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Widanan, I. W., & Gunawarman, A. G. R. (2021). Identifikasi stakeholder dan implikasinya terhadap kesuksesan sebuah proyek studi kasus: Proyek The Baladewa Villas-Bali. *Jurnal Arsitektur Zonasi*, 4(2), 257–266. <https://doi.org/10.17509/jaz.v4i1.34428>

- Yanti, I. H., & Maulidian, M. O. R. (2022). Dampak abrasi pantai yang ditinjau dari sosial ekonomi, lingkungan, dan ekologi masyarakat Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. *Jurnal Pendidikan Geosfer*, 7(2), 228–237. <https://doi.org/10.24815/jpg.v7i2.24020>
- Yuerisman, A. G. (2024). Penanggulangan abrasi pantai berbasis masyarakat di pesisir Kota Pariaman, Sumatera Barat. *Journal of Urban Sociology*, 123–133. <https://doi.org/10.30742/jus.v1i2.4048>

